

## TEORI NEGARA MARXIS

*Eric Hiariej\**

### Abstract

*By offering a contradictory perspective, the article aims to review thoughts by Marx and Engels on state. The key contradictory is on the notion of state as either being a dominant social class instrument (instrumentalist view) or a relatively-autonomous institution (structuralist view). As argued by the author, the contradiction is originated from the shifting perspectives adopted by Marx and Engels. The article underlines further the background of which Marx and Engels produced their theories on state, i.e. as a response to the dominating liberal theory on state. Finally, concepts such as 'class' and 'capitalism' are also discussed in light of the need to comprehend their theory on state based on historical materialism framework.*

**Kata-kata kunci:** *Marx; Engels; negara; kapitalisme; materialisme historis.*

### Pengantar

Tulisan ini bertujuan menelusuri kembali pandangan-pandangan Marx dan Engels tentang negara. Sebagian besar tulisan yang membahas isu ini cenderung mengedepankan kontradiksi dalam pandangan kedua pemikir tersebut. Kontradiksi yang terpenting adalah perbedaan antara cara pandang instrumentalis yang menempatkan negara sebagai alat kepentingan kelas sosial dominan dan perspektif

---

\* *Eric Hiariej* adalah dosen pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol, UGM, Yogyakarta.

strukturalis yang menganggap negara sebagai lembaga yang memiliki otonomi relatif. Tampaknya, kontradiksi ini bersumber dari beberapa perubahan, terutama, dalam perkembangan pemikiran Marx. Beberapa penulis diantaranya merekam perubahan-perubahan tersebut dengan menegaskan perbedaan-perbedaan antara Marx muda dan Marx tua, Marx humanis dan Marx komunis, atau antara Marx yang ilmuwan dan Marx yang filosofis (lihat misalnya Althusser, 1969; Berlin, 1978; Callinicos, 1983).

Di lain pihak tulisan ini menekankan beberapa hal. *Pertama*, teori negara Marx dan Engels harus dilihat dengan dua cara: sebagai jawaban terhadap dominasi teori negara liberal dan Hegelian di Jerman dan Eropa pada waktu itu dan sebagai konsekuensi dari bangunan filsafat *historical materialism* yang mereka kembangkan. Kedua, teori Marx dan Engels tentang negara bisa dikelompokkan menjadi empat macam cara pandang: institusionalis, strukturalis, instrumentalis dan otonomi relatif. Meski perbedaan-perbedaan ini teori yang dikembangkan Marx dan Engels selalu berkaitan dengan dua faktor, yakni negara merupakan tertib sosial yang merepresentasikan kepentingan kelas sosial tertentu dan menjamin kelancaran pembangunan ekonomi kapitalistik. Namun tidak berarti hubungan ekonomi (basis material) dan negara harus bersifat deterministik. Menurut Jessop (2002) hubungan tersebut dalam bentuk yang lebih moderat bisa jadi berbentuk hegemoni dan dominasi aspek ekonomi dalam segala aspek kehidupan sosial lainnya. Bahkan hubungan tersebut, lanjut Jessop, bisa juga dalam kerangka *ecological determinance* (h. 24-8), ketika logika yang berkembang dalam dunia ekonomi mempengaruhi cara berpikir yang digunakan dalam wilayah kehidupan lainnya.

Pada bagian berikutnya tulisan ini akan memulai pembicaraan dengan menengahkan perkembangan teori negara liberal dan Hegelian dan kritik Marx terhadap kedua pendekatan dominan tersebut. Setelah itu pembahasan dipusatkan pada penjelasan tentang konsep kelas dan kapitalisme sebagai upaya meletakkan teori negara Marx dan Engels ke dalam kerangka filsafat *historical materialism*. Bagian keempat membicarakan perspektif institusionalis, strukturalis, instrumentalis dan otonomi relatif. Sedangkan bagian terakhir merupakan kesimpulan.

## Negara Liberal, Negara Hegelian dan Kritik Marx

Dalam tradisi pemikiran politik barat, gagasan tentang negara selalu dikaitkan dengan konsep impersonalitas dan konstitusionalisme, dan kemampuan mengatur dan mengendalikan sebuah masyarakat dalam batas wilayah tertentu. Sekalipun gagasan semacam ini sudah dikemukakan sejak jaman romawi kuno, *otoriterisme* agama, kekuasaan raja yang despotik dan sistem feodalisme abad pertengahan tidak memungkinkan lahirnya konsep negara yang mengakui pemisahan kekuasaan yang tegas antara yang memerintah dan yang diperintah. Baru pada akhir abad ke-16 gagasan tentang negara yang tidak berpihak dan berdasarkan hukum menjadi perhatian para pemikir liberal.

Dua pemikir terkemuka pada masa itu adalah Thoma Hobbes dan John Locke. Pemikiran Hobbes mencerminkan periode peralihan dari semangat absolutisme abad pertengahan menuju gagasan liberalisme abad berikutnya. Sedangkan Locke merupakan *the founding father* tradisi filsafat liberal moderen yang mendominasi politik Eropa Barat dan Amerika Utara sejak abad ke-18. Secara garis besar kedua pemikir ini bertujuan mendamaikan gagasan negara yang tidak berpihak dan berdasarkan hukum dengan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu dan warganegara. Di satu sisi negara memerlukan hak monopoli atas penggunaan kekerasan untuk memberikan jaminan keamanan bagi kehidupan dan kebebasan setiap anggota masyarakat. Di sisi lain, kesejahteraan hidup warganegara membutuhkan pembatasan atas kekuasaan negara yang koersif yang berpotensi merusak hak-hak politik dan kebebasan sipil. Hobbes dan Locke, dan juga pemikir Liberal sesudah mereka, berupaya keras mengatasi dilema antara *might* dan *right*, *power* dan *law*, dan antara *duties* dan *rights* yang selalu melekat di setiap negara modern tersebut.

Dalam *Leviathan* (1651)<sup>1</sup>, Hobbes menggambarkan manusia sebagai makhluk yang selalu berusaha memenuhi kepuasan pribadi dengan segala cara. Kehidupan manusia ditandai dengan konflik kepentingan dan perlombaan kekuasaan, tanpa rasa saling percaya antara sesama dan keinginan untuk bekerjasama secara politik maupun ekonomi. Dalam situasi pranegara kondisi semacam ini melahirkan

---

<sup>1</sup> Semua karya klasik ditulis dalam tahun aselinya.

perang antar sesama tanpa akhir yang membuat kehidupan menjadi *solitary, poore, nasty, brutish, and short*. Menurut Hobbes *the state of nature* yang brutal dan keras bisa diatasi jika setiap individu secara sukarela menyerahkan haknya untuk memerintah diri sendiri kepada sebuah kekuasaan tunggal. Jika semua individu melakukannya secara bersamaan maka kekuasaan tunggal ini akan menjadi otoritas politik yang efektif untuk menciptakan keamanan dan perdamaian dalam jangka waktu yang panjang. Hobbes menambahkan otoritas politik tersebut harus berdasarkan persetujuan rakyat dan menolak hak kekuasaan turun temurun yang diklaim para raja. Namun pemikiran Hobbes bersifat kontradiktif. Di satu sisi ia menjadi seorang liberal yang memahami negara sebagai pelindung kebebasan sipil dan penjaga tertib sosial. Di saat bersamaan, gagasan-gagasan Hobbes juga bertentangan dengan semangat liberalisme karena ia menganjurkan negara absolut dengan kemampuan menciptakan hukum untuk menjaga ketertiban sosial.

Serupa dengan Hobbes, Locke memahami proses pembentukan negara dalam kerangka perlindungan hak-hak alamiah yang dimiliki setiap individu. Legitimasi sebuah pemerintahan tergantung pada kemampuannya menjamin keamanan dan ketertiban yang memungkinkan setiap anggota masyarakat menikmati kehidupan yang bebas dan sejahtera. Akan tetapi Locke menolak gagasan Hobbes tentang perlunya sebuah kekuasaan tunggal. Jika sesama anggota masyarakat tidak memiliki rasa saling percaya, sulit dibayangkan anggota masyarakat yang sama akan mempercayakan hak-hak memerintahnya pada kekuasaan politik tertentu. Selain itu Locke juga menolak gagasan negara absolut karena kekuasaan yang tak terbatas membahayakan kebebasan, kehidupan dan hak pemilikan pribadi warganegara. Dalam *Second Treatise of Government* (1690), Locke membayangkan setiap individu pada mulanya menikmati hak-hak alamiah, hak mengatur diri sendiri dan hak menerapkan sanksi terhadap setiap pelanggar hak asasinya. Dalam *the state of nature* akal sehat memungkinkan setiap individu untuk bertindak rasional mengikuti hukum alam yang menegaskan bahwa setiap manusia akan memberikan balasan yang setimpal terhadap setiap bentuk perlakuan yang ia terima dari sesama manusia lainnya. Akal sehat dan hukum alam ini memungkinkan setiap individu menghindari konflik dan mengutamakan kerjasama

sebagai pilihan interaksi sosial yang lebih rasional. Karenanya kepatuhan pada akal sehat dan hukum alam membuat *the state of nature* tidak berkembang menjadi *the state of war* seperti yang digambarkan Hobbes.

Hanya saja kondisi alamiah ini memiliki beberapa kelemahan mendasar. Ketika setiap anggota masyarakat diberikan kebebasan untuk menginterpretasi *law of nature*, konflik interpretasi yang berpotensi mengancam kebebasan dan persamaan cenderung terjadi. Selain itu jika setiap individu hanya diorganisasikan secara longgar, berdasarkan interaksi sosial yang mengacu pada akal sehat dan hukum alam, maka masyarakat yang terbentuk dari interaksi semacam ini tidak cukup kuat untuk menghadapi agresi dari luar. Persoalan ini bisa diatasi jika setiap individu menyetujui sebuah kontrak sosial untuk membentuk *an independent society* (masyarakat sipil) dan *a civil association* (negara). Locke menegaskan arti penting perbedaan kedua macam entitas tersebut untuk menunjukkan bahwa proses pembentukan sebuah negara harus berdasarkan persetujuan setiap anggota masyarakat. Jika negara tidak mampu atau melanggar tugasnya mewujudkan kebebasan dan persamaan maka hak menilai dan menghukum pelanggaran tersebut berada di tangan setiap anggota masyarakat.

Hegel mewarisi tradisi pemikiran politik liberal yang cenderung memisahkan negara dan masyarakat sipil sebagai dua entitas yang berbeda dan sering bertentangan. Bedanya, Hegel memberikan tekanan lebih besar kepada negara yang dia terima sebagai institusi yang otonom dengan kemampuan menyelesaikan konflik kepentingan yang selalu melekat dalam masyarakat sipil. Teori Hegel tentang negara berangkat dari proses pemahaman yang lebih luas tentang perkembangan sejarah umat manusia. Sejarah dipahami sebagai proses realisasi dan aktualisasi sebuah ide universal yang akan menjelmakan dirinya dalam bentuk masyarakat manusia yang sempurna. Dalam sejarah berlangsung proses saling mempengaruhi antara ide universal dan kenyataan hidup sehari-hari dalam hubungan dialektik antara "ada" dan "tiada" hingga "menjadi" kenyataan yang ideal. Perkembangan sejarah karenanya bersifat deterministik dengan ujung yang sudah pasti. Negara, dalam kerangka berpikir seperti ini, merupakan perwujudan ide universal. Negara merupakan agen sejarah yang berupaya keras merealisasikan

ide universal tersebut menjadi masyarakat sempurna. Sebaliknya individu yang mewakili kenyataan hidup sehari-hari yang kurang (belum) sempurna dan penuh konflik kepentingan bukan agen sejarah yang bisa diharapkan. Karenanya setiap individu harus patuh pada negara yang merepresentasikan kepentingan bersama untuk kebaikan semua anggota masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang etnik, agama maupun kelas.

Dalam *Philosophy of Right* (1821) Hegel memahami masyarakat sipil sebagai wilayah penguasaan kepentingan pribadi. Ekspansi pasar bebas yang memerdekakan manusia dari kungkungan agama, etika dan politik abad pertengahan berperan besar dalam proses pembentukan masyarakat sipil. Namun tekanan pada pasar bebas tidak membuat Hegel menjadi seorang utilitarian seperti Jeremy Bentham dan James Mill yang memahami manusia sebagai makhluk yang mengutamakan kepuasan pribadi. Sebaliknya, selain kompetisi kepentingan, sebuah masyarakat sipil juga terbentuk berdasarkan akal sehat yang dikodifikasikan dalam aturan hukum. Hukum menyediakan jaminan keamanan kepada setiap manusia dan hak pemilikan pribadinya dan karenanya menciptakan mekanisme sosial yang mampu membatasi efek negatif konflik kepentingan antar individu. Negara menjadi penting karena institusi ini merupakan sumber akal sehat atau aturan hukum yang memungkinkan konflik kepentingan tidak bersifat destruktif. Negara juga meminimalisir konflik kepentingan tersebut dengan cara memberikan kesempatan berpartisipasi bagi setiap anggota masyarakat dalam proses menentukan *general will*. Pada gilirannya negara akan menjadi pusat dari seluruh aktivitas masyarakat sipil dan pusat perkembangan hukum, budaya, identitas nasional dan segala aspek kehidupan sosial. Dengan mengidentifikasi dirinya dengan negara, setiap individu akan terhindar dari kompetisi yang cenderung anarkis dalam masyarakat sipil. Tegasnya, sekalipun mengakui pemisahan negara dan masyarakat sipil, Hegel menyelesaikan perbedaan dan pertentangan antara keduanya dengan mengintegrasikan masyarakat sipil ke dalam negara.

Teori Marx dan Engels tentang negara merupakan alternatif terhadap pemikiran liberal dan filsafat hegelian yang mendominasi peta pemikiran politik Barat sejak akhir abad ke-16. Marx menolak konsep negara otonom yang diajarkan Hegel dan argumen negara

netral yang merepresentasikan kepentingan seluruh anggota masyarakat yang diajukan Hobbes dan Locke. Pada awalnya, tradisi filsafat Hegelian membawa pengaruh besar terhadap pemikiran Marx. Dalam berbagai artikel yang ditulis untuk *Rheinische Zeitung* dari Mei 1842 sampai Maret 1843, ia berulang kali menyebut negara sebagai institusi yang melindungi kepentingan umum dan menjamin kepastian hukum bagi kemerdekaan individu. Dalam sebuah artikel yang ditulis dalam bulan Juli 1842 ia menegaskan para pemikir modern memahami negara sebagai entitas sosial terpenting yang harus diwujudkan demi kepentingan hukum, moral dan kemerdekaan politik. Setiap individu wajib mematuhi negara karena kepatuhan tersebut sama nilainya dengan kepatuhan pada hukum alam yang berdasarkan akal sehat (dikutip dalam Miliband, 1973). Tapi kemudian Marx mulai menyadari bahwa teori negara yang ideal versi Hegel sering bertentangan dengan praktik negara dalam kehidupan nyata. Dia mulai menulis, sebuah negara yang tidak mewujudkan kebebasan rasional adalah sebuah *bad state*. Dalam tulisan lain ia mengkritik penolakan parlemen Rhineland terhadap hak asasi orang miskin dan menuduh pemerintah sebagai pelindung kepentingan orang kaya (dikutip dalam Miliband, 1973). Akhirnya Marx sampai pada kesimpulan bahwa dalam memahami keberadaan sebuah negara kebanyakan pemikir (terutama Hegel) memberikan perhatian yang terlalu besar terhadap perilaku negara itu sendiri dan mengabaikan arti penting *the concrete nature of circumstances* yang menentukan tindak tanduk negara yang bersumber dari tekanan kekuatan-kekuatan sosial non-negara (dikutip dalam Miliband, 1973).

Dalam *Critique of Hegel's Philosophy of Right* (1843a), Marx menilai pemikiran Hegel bersifat *absurd* karena ia memahami negara secara abstrak dan terlepas dari kekuatan sosial yang besaing di tengah masyarakat. Hegel mengabaikan kenyataan bahwa aktivitas negara tidak bedanya dengan aktivitas dan kualitas manusia yang mengoperasikannya. Memahami perilaku negara, karenanya, hanya bisa dilakukan dengan memahami *the concrete nature of circumstances*, perimbangan kekuatan di tengah masyarakat yang menghasilkan pengaruh yang tidak bisa dielakkan oleh negara. Lebih jauh Marx menulis, pertentangan antara negara dan masyarakat (sipil) bersifat nyata. Pertentangan ini tidak pernah bisa diselesaikan negara yang

dianggap sebagai sumber akal sehat yang mengatasi segala macam konflik kepentingan. Pada kenyataannya negara tidak memiliki kapasitas mengatasi kepentingan-kepentingan pribadi. Sebaliknya negara selalu berada di bawah subordinasi hak-hak pemilikan pribadi. Karenanya argumen Hegel yang menegaskan bahwa negara memiliki kemampuan mengatur dan menentukan segala macam aspek kehidupan sosial secara mandiri menurut Marx hanyalah sebuah ilusi. Alih-alih menyelesaikan, negara malah memistifikasi pertentangan antara negara dan masyarakat sipil dan konflik kepentingan antar individu.

Dengan cara berpikir seperti itu, Marx—dan juga Engels—berkali-kali menolak gagasan negara netral yang diajukan para pemikir liberal. Model negara demokrasi liberal seperti yang digambarkan John Stuart Mill boleh saja mengklaim dirinya sebagai representasi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Akan tetapi janji mulia ini tidak pernah bisa diwujudkan dalam sebuah masyarakat industri berdasarkan sistem produksi kapitalisme. Jaminan kemerdekaan, persamaan dan keamanan yang dijanjikan negara netral versi pemikir liberal, menurut Marx, bertentangan dengan pemilahan sosial dalam masyarakat berdasarkan kelas. Apa artinya persamaan antara sesama yang dijanjikan negara jika pada kenyataannya kesenjangan sosial dan ekonomi menghambat setiap individu untuk memperoleh penghargaan yang setara? Siapa yang bisa mempercayai negara yang menjanjikan kesejahteraan bagi setiap warganya jika dalam kehidupan sehari-hari keberuntungan segelintir pemilik modal dan alat produksi berbanding terbalik dengan kesengsaraan para pekerja dan petani? Dalam *On the Jewish Question* (1843b) Marx membedakan emansipasi politik dan emansipasi manusia. Pembentukan negara netral yang diajukan para pemikir liberal boleh jadi berdasarkan emansipasi politik negara terhadap kekangan tradisi abad pertengahan. Akan tetapi, pembentukan negara liberal ini tidak serta merta membawa emansipasi manusia, yang membebaskan setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan sosial. Malah sebaliknya negara liberal membiarkan ketidakadilan dan ikut mencegah perwujudan emansipasi manusia.

### **Kelas dan Kapitalisme**

Kritik Marx terhadap konsep negara liberal dan Hegelian perlu dipahami dalam kerangka pemikiran Marx yang lebih luas tentang



posisi individu dalam masyarakat, hubungan-hubungan produksi, dan sistem produksi modern yang ia sebut kapitalisme. Pada dasarnya Marx bisa menerima keberadaan individu sebagai organisme yang memiliki kapasitas unik, hasrat dan kepentingan untuk memilih secara bebas. Namun, ia menolak pandangan liberal yang melihat individu sebagai organisme yang abstrak tanpa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang bersifat riil. Ia juga mengkritik kecenderungan menempatkan individu sebagai entitas sosial paling utama untuk memahami kehidupan politik dan perilaku negara (Giddens and Held, 1982). Dalam *The Critique of Hegel's Philosophy of Right* (1843a) Marx menegaskan, "*man is not an abstract being squatting outside the world. Man is the human world, the state, society*" (h. 131). Keberadaan individu karenanya hanya bisa diterima dalam kaitannya dengan sesama individu lainnya. Individu bukanlah sekumpulan organisme yang bertindak secara otonom yang terlibat aktif dalam produksi dan kehidupan politik, melainkan *human beings* yang hidup dalam jaringan interaksi dan relasi sosial dengan sesama manusia lainnya. Sifat-sifat dasar dan perilaku setiap individu merupakan produk sejarah yang bersumber dari berbagai bentuk interaksi dan relasi sosial tersebut. Marx karenanya memahami masyarakat bukan sebagai kumpulan individu, tetapi sebagai kumpulan interaksi sosial antara manusia. Bagi pemikir liberal, perbedaan antara seorang budak dan majikan menjadi tidak penting karena kedua-duanya merupakan individu yang berdaulat. Akan tetapi bagi Marx perbedaan itu sangat nyata karena merupakan produk interaksi antar manusia yang membawa efek ekonomi dan sosial yang bertolak belakang (Marx, 1858).

Kunci untuk memahami perilaku individu adalah struktur kelas. Akan tetapi, tidak semua masyarakat mengalami proses pemilahan berdasarkan kelas. Masyarakat tribal, diantaranya, tidak mengenal kelas karena masyarakat ini tidak mengenal *surplus* dan tidak mengakui pemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Sistem produksi dijalankan secara gotong royong dan hasilnya dibagikan secara merata kepada setiap anggota masyarakat. Sebaliknya, pemilahan kelas hanya berkembang dalam sistem produksi yang mengejar *surplus* dan mengakui hak-hak pemilikan pribadi. *Surplus* tersebut dicapai setelah kelas sosial non-produktif berhasil menguasai alat-alat produksi dan memaksakan eksploitasi atas kelas sosial produktif (Marx, 1867). Kelas

sosial yang menguasai alat-alat produksi menjadi kelas dominan, sementara kelas sosial produktif yang ditindas atas nama keuntungan menjadi kelas subordinan.

Pada gilirannya, ketika sistim produksi yang mengejar *surplus* dan mengakui hak-hak properti ini berkembang menjadi sistim produksi yang utama, kelas dominan dan subordinan akan menjadi dua kelas utama yang membelah masyarakat. Hubungan antara kedua kelas ini selalu ditandai oleh eksploitasi dan konflik, yang berpengaruh besar terhadap dinamika sebuah masyarakat (Marx dan Engels, 1848). Sayangnya, tulisan-tulisan Marx tidak memberikan perhatian cukup serius pada kemungkinan hubungan yang saling tumpang tindih antara penindasan berdasarkan kelas dan penindasan berbasis gender. Topik ini baru menjadi perhatian yang cukup serius dalam tulisan Engels, *On the Origins of the Family, Private Property and the State*. Menurut Engels (1884), dalam masyarakat kuno yang bersifat *matriarchal* posisi perempuan sedikit lebih dominan dibanding laki-laki. Namun hubungan antar keduanya berubah total setelah pengakuan atas hak-hak pemilikan pribadi. Laki-laki menjadi lebih beruntung karena hak atas warisan memungkinkan laki-laki menguasai hak-hak pemilikan tersebut.

Dalam masyarakat modern struktur kelas merupakan produk sistem kapitalisme. Sistim ini dibangun berdasarkan hak pemilikan pribadi atas faktor produksi, kebebasan mempertukarkan barang dan jasa, dan relasi yang tidak seimbang antara modal dan tenaga kerja. Produksi ditujukan untuk menghasilkan *profit* dan *surplus value* dan bukan untuk kepentingan jangka panjang memuaskan kebutuhan manusia (Held, 1996; Brown, 1995; MacEwan, 1999). Menurut Marx, sistim ini pada dasarnya mengandung ketegangan-ketegangan yang melekat secara inheren dalam keseluruhan proses menghasilkan *profit* dan *surplus value*. Perkembangan sejarah dalam banyak hal ditentukan oleh hasil ketegangan-ketegangan ini, diantaranya ketegangan antara hubungan produksi dan teknik produksi dan konflik kelas.

Menurut Marx, sistim produksi kapitalisme terdiri dari, setidaknya, dua macam struktur dasar yang disebut Marx dengan *social formation* dan *mode of production* (Marx, 1859). Formasi sosial merupakan kumpulan interaksi dan lembaga-lembaga sosial yang membentuk sebuah masyarakat. Struktur ini meliputi seluruh aspek

kehidupan sosial termasuk sistim ekonomi, sistim kekuasaan dan kehidupan budaya yang saling berhubungan satu sama lain. Formasi sosial dibentuk oleh determinasi *mode of production* atau infrastuktur ekonomi atas kesadaran sosial, kehidupan budaya dan sistim politik.

Di lain pihak, infrastruktur ekonomi—atau sering juga disebut *economic base*—merupakan kombinasi dari *relations of production* dan *forces of production* (Marx, 1859). Marx menjelaskan *relations of production* menyangkut tiga jenis relasi sosial: *pertama*, hubungan-hubungan produksi yang bersifat primer seperti hubungan buruh dan majikan; *kedua*, hubungan-hubungan produktif yang bersifat sekunder seperti serikat buruh, asosiasi pemilik modal dan pola-pola dasar kehidupan keluarga yang berkaitan erat dengan sistim produksi kapitalistik; dan hubungan-hubungan politik dan sosial yang bersumber dari hubungan produksi primer dan sekunder seperti negara, lembaga-lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang mencerminkan hubungan buruh-majikan. Sementara itu, *forces of production* meliputi alat-alat produksi, teknik produksi, sumber daya alam dan manusia dan pengorganisasian produksi berdasarkan alat, teknik dan sumber daya yang dimiliki. Menurut Marx, infrastruktur ekonomi berpengaruh besar terhadap bentuk dasar masyarakat. Hubungan produksi, diantaranya, menentukan proses menghasilkan *surplus*. Sebuah formasi sosial dapat dikategorikan kapitalistik jika hubungan produksi ini ditujukan untuk merebut *use value* yang dihasilkan pekerja dan mengubahnya menjadi *exchange value* yang dilekatkan pada komoditi tertentu sebelum menghasilkan *profit*. Pemisahan antara kelompok sosial yang menghasilkan *profit*—dan karenanya menguasai kapital—dan kelompok sosial yang hanya mampu menjual tenaga kerjanya bukan saja menentukan hubungan kelas, tetapi juga menjadi basis eksploitasi dan konflik sosial dalam masyarakat modern.

Pemahaman tentang kelas dan kapitalisme membawa implikasi luas terhadap pemahaman Marx dan Engels tentang negara. Bertolak belakang dengan Hegel yang memisahkan negara dari masyarakat (sipil) sembari menempatkan negara sebagai aktor yang otonom dan menentukan, Marx memahami kehadiran negara sebagai bagian dari dinamika yang terjadi dalam masyarakat, terutama hubungan antar kelas sosial yang konfliktual. Marx dan Engels juga berbeda dengan para pemikir liberal yang memusatkan perhatiannya pada ketegangan

antara hak-hak individu dan netralitas negara karena ia melihat keberadaan otoritas politik dalam konteks sistem produksi untuk menghasilkan *surplus value* yang menjadi basis material hubungan tidak seimbang antara kelas dominan dan subordinan. Bagi Marx, gagasan tentang negara harus selalu dikaitkan dengan dua faktor. *Pertama*, negara merupakan orde politik yang merepresentasikan kepentingan kelas sosial dominan, termasuk di dalamnya menjamin keberlangsungan dominasi modal atas tenaga kerja. *Kedua*, negara juga merupakan orde politik yang menjamin keberlangsungan akumulasi kapital tanpa gangguan perjuangan kelas.

### **Teori Negara Marx dan Engels**

Teori Marx dan Engels tentang negara tersebar dalam berbagai tulisan. Dalam *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (1852) Marx menggambarkan negara (Perancis) sebagai sebuah kekuasaan eksekutif yang dilengkapi dengan organisasi militer dan birokrasi. Dalam 'The Civil War in France' (1871) ia menyebut negara yang sama dalam konteks "*centralised state power with its ubiquitous organs of standing army, policy, bureaucracy, clergy, and justice*" (h. 402). Sementara dalam *Critique of the Gotha Programme* (1875) perhatian Marx ditujukan pada negara Prussia yang ia gambarkan sebagai "*a police-guarded military despotism, embellished with parliamentary form...and bureaucratically carpentered...*" (h. 29-30). Di lain pihak Engels mendefinisikan negara dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Marx. Dalam *On the Origins of Family, Private Property, and the State* ia menggambarkan negara sebagai sebuah organisasi sosial berdasarkan wilayah teritorial dengan wewenang mengoperasikan kekuatan militer, menarik pajak, dan menjalankan administrasi. Boleh dibilang, kedua pemikir ini tidak mengembangkan sebuah definisi negara yang mengacu pada institusi-institusi dan prosedur-prosedur tertentu seperti yang dilakukan ilmu politik dan sosiologi. Sebaliknya Marx dan Engels menolak kecenderungan mendefinisikan negara sebagai struktur yang sepenuhnya otonom sembari memberikan perhatian yang lebih besar pada faktor-faktor penentu perilaku negara seperti sistem ekonomi dan struktur kelas sosial.

Seperti ditegaskan di atas, pada mulanya pemahaman Marx tentang negara mencerminkan pengaruh filsafat Hegelian. Dalam

tulisan-tulisan awalnya, Marx juga belum mengembangkan teori negara berdasarkan kelas atau konsep negara kapitalis. Ia, diantaranya, memperlakukan negara sebagai sebuah sistem dominasi politik yang bersifat abstrak yang menolak sifat sosial manusia dan mengasingkan manusia dari kehidupan publik. Ia juga menganggap para pejabat pemerintah sebagai aktor-aktor yang mempresentasikan kepentingan pribadi dan melihat upaya birokrasi menguasai kekuasaan negara sebagai bagian dari proses memperbesar kekuasaan para birokrat (Jessop, 1982). Sementara perkembangan pemikiran Engels mengambil jalan yang berbeda. Ketika Marx sedang sibuk menyelesaikan *1844 Paris Manuscript*, Engels sudah mulai memformulasikan sebuah versi awal tentang negara kapitalis dalam salah satu tulisan klasiknya, *The Condition of the Working Class in England* (1845). Dalam tulisan ini Engels menjelaskan, (kekuasaan) negara merepresentasikan kekuasaan *property* yang secara spesifik ia identikkan dengan *middle class* dan/atau *bourgeoisie*. Hanya saja, Engels tidak mengembangkan lebih jauh teori negara berdasarkan kelas dalam bagian lain dari tulisan tersebut. Formulasi negara kapitalis yang lebih lengkap baru muncul beberapa tahun kemudian setelah kedua pemikir ini bertemu dan menghasilkan beberapa tulisan bersama (Jessop, 1982).

Salah satu tema sentral dalam teori Marx dan Engels tentang negara adalah pengaruh *economic base* terhadap keseluruhan bangunan *political superstructure*. Menurut cara pandang strukturalis ini, negara mencerminkan *economic base* sebuah masyarakat. Intervensi yang dilakukan negara bertujuan untuk memenuhi kepentingan sistem produksi yang bertujuan menghasilkan *surplus value* dan hubungan produksi merupakan fondasi dasar yang menentukan bentuk sistem politik dan kesadaran sosial (Marx, 1859). Lebih jauh, dalam *The German Ideology* (1845) Marx dan Engels menjelaskan, perkembangan negara berjalan seiring dengan pembagian kerja sosial di masyarakat yang melahirkan kelas dominan dan kelas subordinan. Konflik politik dalam negara—antar partai yang berbeda, antar politisi, atau antar birokrat—hanyalah sebuah ilusi karena konflik yang sebenarnya berlangsung pada level antagonisme antara kelas dominan dan kelas subordinan. Dalam *The Poverty of Philosophy* (1847) Marx menulis “[i]t is the sovereigns who in all ages have been subject to economic conditions, but it is never they who have dictated laws to them. Legislation, whether

*political or civil, never does more than proclaim, express in words, the will of economic relations"* (h. 70). Sementara dalam *Das Kapital* (1894) Marx menambahkan, "[i]t is always the direct relationship of the owners of the conditions of production to the direct producers...which reveals...the hidden basis of the entire social structure, and with it the political form of the relation of sovereignty and dependence, in short, the corresponding specific form of the state" (h. 791).

Argumen *base-superstructure* menimbulkan kesan reduksionisme dan determinisme ekonomi. Jessop menyadari kecenderungan ini ketika ia menegaskan, "[a]t its most extreme...the state is a pure epiphenomenon of the economic base with no reciprocal effectivity and ...there is a perfect correspondence between base and superstructure" (1982, h. 10). Pada kenyataannya, Marx dan Engels menjelaskan bahwa sistem produksi yang berbeda menghasilkan bentuk negara yang berbeda dan perubahan metode produksi dan perimbangan kelas menentukan perubahan sifat kekuasaan negara. Dalam masa transisi dari feodalisme menuju kapitalisme, misalnya, sistem produksi memerlukan kehadiran negara yang kuat. Sebaliknya setelah memasuki fase kapitalisme penuh berdasarkan prinsip-prinsip *laissez-faire* sistem produksi menghendaki negara yang lemah dan tidak banyak melakukan campur tangan dalam urusan-urusan ekonomi (Marx, 1858; Engels, 1878). Akan tetapi sebetulnya, teori Marx dan Engels tentang negara tidak sepenuhnya bersifat *reductionist* dan *mono determinist* karena selain argumen *base-superstructure* kedua penulis ini juga mengembangkan teori negara instrumentalis. Dalam teori ini negara merupakan refleksi kepentingan kelas sosial. Kelas sosial itu sendiri bukan merupakan struktur yang bersifat monolitik, melainkan terdiri dari kepentingan-kepentingan yang bertolak belakang. Konsekuensinya, negara instrumentalis tampil dalam bentuk yang lebih dinamik mengikuti perubahan-perubahan yang selalu berlangsung dalam konflik kelas.

Secara garis besar teori instrumentalis tidak melihat negara sebagai institusi yang independen dan memiliki kedaulatan politik, tetapi sebagai instrumen penindasan dan administrasi yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan oleh kelas-kelas sosial yang mengontrol kekuasaannya. Engels (1845) diantaranya menggunakan pandangan instrumentalis ini ketika melihat kekuasaan negara selalu berada di tangan kelas sosial tertentu—*middle class*—yang

menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan mempertahankan dominasi ekonomi dan politik atas kelas-kelas sosial lainnya. Akan tetapi argumen instrumentalis baru berkembang dalam bentuk yang lebih tegas ketika Marx dan Engels (1845) menjelaskan "...the bourgeoisie is forced to organize itself no longer locally but nationally, and to give general form to its mean average interests" (h. 59). Keduanya melanjutkan, *general form* tak lain dari negara yang digambarkan sebatas "*nothing more than the form of organization which the bourgeoisie necessarily adopt both for internal and external purposes, for the mutual guarantee of their property and interest*" (h. 59). Lebih jauh Marx dan Engels (1848) menulis, "*the executive of modern state is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie*" (h. 35) dan kekuasaan politik hanyalah "*the organized power of one class for oppressing other*" (h. 51).

Dalam mengembangkan pendekatan instrumentalis Marx dan Engels memberikan perhatian yang cukup besar terhadap analisis perjuangan kelas. Dalam tulisan-tulisan yang lebih awal, kedua pemikir ini menjelaskan tentang proses polarisasi yang ditimbulkan pertumbuhan kapitalisme produksi yang membelah masyarakat menjadi kelas pemilik modal dan kelas proletar. Perjuangan kelas ditandai dengan kontrol kelas pemilik modal atas kekuasaan negara yang digunakan untuk menindas kelas proletar (lihat misalnya Marx and Engels, 1848) Sementara, dalam tulisan-tulisan yang lebih belakangan, Marx dan Engels menggambarkan konflik kelas dalam suasana yang lebih dinamis. Keduanya, misalnya, berbicara tentang faksionalisme—Marx dan Engels menyebutnya dengan *fraction*—dalam kelas sosial, hubungan antara fraksi-fraksi yang berbeda dalam satu kelas sosial, dan kemungkinan-kemungkinan bagi aliansi kelas. Kedua pemikir ini juga menyinggung arti penting kelas-kelas sosial lainnya seperti petani dan *lumpenproletariat*. (Poulantzas, 1973). Analisa perjuangan kelas semacam ini membawa implikasi luas. Marx dan Engels kemudian melihat kekuasaan negara bukan saja dalam kerangka konflik antara kelas pemilik modal dan kelas proletar, tetapi juga dalam konteks konflik kepentingan antar sesama borjuasi. Lebih penting lagi, keduanya melihat konflik kelas tidak sebatas cerminan perubahan dalam proses produksi, tetapi sebagai proses yang bisa dilihat sebagai unit analisa yang berdiri sendiri sepanjang kelas sosial merupakan

struktur yang terdiri dari kepentingan-kepentingan yang berbeda. Akibatnya, perubahan dalam karakter dasar kekuasaan negara tidak lagi bersifat monodeterministik mengikuti kehendak *economic base*, tetapi juga dipengaruhi konflik kelas yang tidak melulu berlangsung pada level sistem produksi (Jessop, 1982). Tak heran jika Marx dan Engels berulang kali menegaskan bahwa kontrol kelas sosial dominan atas kekuasaan negara tidak pernah dilakukan kelas sosial ini sebagai suatu kesatuan. Sebab dalam praktiknya hanya fraksi tertentu dari kelas dominan yang benar-benar mengontrol negara (lihat misalnya Marx, 1852).

Sekalipun upaya Marx dan Engels menekankan arti penting kontrol kelas sosial atas kekuasaan negara mampu mengurangi kecenderungan reduksionisme dan determinisme ekonomi, pendekatan instrumentalis masih meninggalkan beberapa persoalan. Diantaranya, pendekatan ini cenderung menempatkan negara kapitalis sebagai institusi yang bersifat netral dan pasif, menyerupai negara versi para pemikir liberal. Jika Marx dan Engels menekankan konflik kelas sebagai basis utama kekuasaan negara, para pemikir liberal bertolak dari konflik pada level individu sebagai faktor penentu perilaku negara. Persoalannya, menurut Jessop (1982), "*if the state is a simple instrument of class rule...how the dominant mode of production is successfully reproduced when the economically dominant class does not actually occupy the key positions in the state system*" (h. 15).

Sebetulnya Marx dan Engels (1858) telah mengantisipasi kritik yang diajukan Jessop ketika keduanya menggambarkan politik Inggris di abad ke-19 yang berada di bawah kekuasaan aristokrat pemilik tanah yang memerintah atas nama pemilik kapital. Keduanya memunculkan kembali gambaran serupa ketika menjelaskan kekuasaan Louis Bonaparte semasa kekaisaran kedua di Perancis dan kekuasaan *German Reich* di bawah Bismarck. Dalam kedua kasus ini negara berhasil memperoleh derajat independensi tertentu terhadap kontrol kelas dominan karena perimbangan kekuatan antara kelas-kelas sosial mencapai sebuah titik *equilibrium* yang tidak memungkinkan dominasi salah satu kelas—termasuk para pemilik modal—terhadap kelas lainnya (Marx and Engels, 1845; Marx, 1852; Marx, 1871; Engels, 1872; Engels, 1878, Engels, 1884). Tegasnya, jika teori instrumentalis mendefinisikan negara sebagai alat kekuasaan kelas dominan, dalam berbagai



tulisannya Marx dan Engels mengajukan berbagai kemungkinan bagi munculnya negara yang memiliki kekuasaan yang relatif independen terhadap kontrol borjuasi, kelas menengah maupun buruh dan petani. Bahkan keduanya menulis, kekuasaan negara boleh jadi dioperasikan oleh para elit yang bukan berasal dari kelas sosial yang secara ekonomi tergolong kelas dominan (Marx and Engels, 1858).

Marx dan Engels telah membahas teori negara otonom sejak *The German Ideology* ketika keduanya menjelaskan, negara muncul dan berdiri di atas antagonisme kelas, agar negara memiliki kemampuan untuk mengelola kepentingan umum *gentile society*.<sup>2</sup> Sedangkan Engels (1884) menulis, kehadiran sebuah negara diperlukan untuk menengahi konflik yang pasti terjadi antar kelas sosial yang berbeda dan mengelola konflik tersebut dalam batas-batas yang dapat diterima dalam sebuah tertib sosial. Akan tetapi bentuk paling ekstrim dari negara otonom bisa ditemukan dalam kekuasaan otoriter Louis Bonaparte. Dalam studi sejarah atas kekaisaran Perancis kedua ini, Marx berupaya menjelaskan karakter dasar tipe kekuasaan negara yang dibentuk Bonaparte melalui sebuah kudeta. Marx (1852) mencatat, kudeta tersebut merupakan "*the victory of Bonaparte over parliament, of the executive power over the legislative power*" (h. 103). Dia melanjutkan "[t]he struggle seems to be settled in such a way that all classes, equally impotent and equally mute, fall on their knees before the rifle butt" (h. 103) dan "*only under ...Bonaparte...the state seem to have made itself completely independent. The state machine has established itself so firmly vis-à-vis civil society...*" (h. 105).

Menurut Miliband (1977), secara sepintas penjelasan Marx memberi kesan kudeta yang dilakukan Bonaparte berhasil mendirikan sebuah negara yang sepenuhnya otonom terhadap kontrol kelas sosial dominan. Penjelasan tersebut juga cenderung mengembalikan pengaruh kerangka berpikir Hegelian yang menekankan pemisahan *state-civil society* dan *public-private*. Sebaliknya, Marx menegaskan "*the state power does not hover in mid-air*" Ia menjelaskan, sekalipun independen, Bonaparte secara terus menerus berupaya menampilkan dirinya

---

<sup>2</sup> Gentile secara literal bisa diartikan sebagai seseorang atau kelompok sosial tertentu yang memiliki status sosial yang tinggi. Pada masa peralihan dari feodalisme ke kapitalisme di Inggris, Perancis dan Jerman yang masuk dalam kategori *gentile society* biasanya para pemilik *property rights*, seperti tuan tanah dan borjuasi.

sebagai representasi kelas sosial tertentu. Pada mulanya, Bonaparte mengidentikkan dirinya sebagai pelindung kepentingan para petani kecil pemilik tanah. Ia juga membenarkan kudeta yang ia lakukan sebagai upaya mengembalikan *bourgeois order*, dan karenanya mendefinisikan kekuasaan yang dimilikinya sebagai representasi kepentingan kelas menengah. Bahkan, Bonaparte juga melihat dirinya sebagai "...the representative of the lumpenproletariat to which he himself, his entourage, his government and his army belong..." (Marx, 1852, h. 113). Akan tetapi bagi Marx, meskipun Bonaparte berusaha keras menempatkan dirinya sebagai "the chief of society" yang mengatasi kepentingan semua kelas sosial, dalam praktiknya bonapartisme bertujuan mendukung dan mempertahankan orde sosial borjuis yang memungkinkan keberlangsungan dominasi ekonomi dan politik para pemilik modal atas pekerja (Miliband, 1973). Kekuasaan otoriter Bonaparte berhasil mengalahkan *bourgeois republic* karena kekuasaan ini "was the only form of government possible at a time when then bourgeoisie had already lost, and the working class had not yet acquired, the faculty of ruling nation" (Marx, 1871, h. 404). Di bawah kekuasaan Bonaparte, Marx mencatat, "bourgeois society, freed from political cares, attained a development unexpected even by itself" (h.404). Ia kemudian menggambarkan *imperialism*—yang ia maksudkan rezim imperialis yang dibentuk Napoleon—sebagai "at the same time, the most prostitute and the ultimate form of the state power which nascent middle-class society had commenced to elaborate as a means of its own emancipation from feudalism, and which full-grown bourgeois society had finally transformed into a means for the enslavement of labour by capital" (h. 405). Karenanya, dalam pandangan Marx, otonomi negara Bonapartis bersifat relatif, dibatasi kewajiban memenuhi kepentingan kelas pemilik modal dan menjaga keberlangsungan orde sosial dominan yang berintikan sistim produksi kapitalistik. Dalam *On the Origins of the Family, Private Property and the State*, Engels mendukung pandangan Marx ketika ia menegaskan, sekalipun negara memiliki kapasitas untuk berdiri di atas kepentingan-kepentingan sosial yang bertolak belakang, negara tersebut tetap saja merupakan "the state of the most powerful, economically dominant class, which through the medium of the state, becomes also the politically dominant class, and thus acquires new means of holding down and exploiting the oppressed class" (h. 228).

Marx dan Engels menolak teori negara liberal maupun teori negara yang dikembangkan Hegel. Kedua pemikir ini menolak pandangan yang melihat negara sebagai lembaga yang netral maupun lembaga yang sepenuhnya otonom. Sebaliknya Marx dan Engels menekankan konflik kepentingan pada level masyarakat sebagai faktor penentu. Perimbangan kekuatan yang dihasilkan konflik di tengah masyarakat ini akan menghasilkan kelas sosial dominan yang memiliki kapasitas lebih besar untuk mengendalikan negara, dan karenanya membuat negara tidak bisa dilihat sebagai lembaga yang tidak berpihak. Namun keberpihakan negara perlu dipahami dengan tiga cara. *Pertama*, keberpihakan pada kelas dominan merupakan konsekuensi yang sulit dielakkan karena kelas sosial ini sering kali menempati posisi paling strategis bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi. Namun, *kedua*, ketergantungan pada kesehatan perekonomian sering kali memaksa negara untuk mengambil tindakan yang bisa jadi bertentangan dengan kepentingan kelas dominan. *Ketiga*, peran aktif negara ini bertambah penting ketika kelas dominan yang mustinya mengambil peran utama dalam proses akumulasi modal tidak cukup siap secara ekonomi maupun tidak cukup mampu secara politik, misalnya, untuk mengontrol kelas subordinan. \*\*\*

#### Daftar Pustaka

- Althusser, L. (1969). *For Marx*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Berlin, I. (1978). *Karl Marx*. Oxford: Oxford University Press.
- Brown, M. B. (1995). *Models in Political Economy*. London: Penguin Books.
- Callinicos, A. (1983). *Marxism and Philosophy*. Oxford: Clarendon Press.
- Engels, F. (1845). *The Condition of Working Class in England*. Dalam Marx-Engels Collected Writings, vol. IV.
- Engels, F. (1872). *The Housing Question*. Dalam Marx-Engels Selected Writings, vol. III.

- Engels, F (1878). *Anti-Duhring*. Moscow: Progress Publishers (1975).
- Engels, F. (1884). *On the Origins of the Family, Private Property and the State*. New York: International Publishers (1993).
- Giddens, A dan Held, D. (1982). *Classes, Power and Conflict*. London: Macmillan.
- Hegel, G.W.F. (1821). *Philosophy of Right*. Oxford: Oxford University Press (1967).
- Held, D. (1996). *Models of Democracy*. London: Polity Press.
- Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. London: Penguin Books (1985).
- Jessop, B. (1982). *The Capitalist State*. Oxford: Martin Robertson.
- Jessop, B. (2002). *The Future of Capitalist State*. London: Polity Press.
- Locke, J. (1690). *Second Treatise of Government*. Cambridge: Hackett Publishing Company (1980).
- MacEwan, A. (1999). *Neo-Liberalism or Democracy?* London: Zed Books.
- Marx, K. (1843a). *The Critique of Hegel's Philosophy of Right*. Cambridge: Cambridge University Press (1970).
- Marx, K. (1843b). *On the Jewish Question*. Dalam L. Colletti (ed.), *Marx: Early Writings*. London: Penguin Books (1975).
- Marx, K. (1847). 'The Poverty of Philosophy.' Dalam L.S. Feuer (ed.), *Marx and Engels: Basic Writings on Politics and Philosophy*. London: Collins (1971).
- Marx, K. (1852). *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*. Moscow: Progress Publishers (1972).
- Marx, K. (1858). *Grundrisse*. London: Penguin Books (1973).
- Marx, K. (1859). 'Preface' to *A Contribution to the Critique of Political Economy*. Moscow: Progress Publishers (1970).

- Marx, K. (1867). *Capital, vol. I*. Moscow: Progress Publishers (1974).
- Marx, K. (1871). 'The Civil War in France.' Dalam L.S. Feuer (ed.), *Marx and Engels: Basic Writings on Politics and Philosophy*. London: Collins (1971).
- Marx, K. (1875). *Critique of the Gotha Programme*. London: Lawrence and Wishart (1939).
- Marx, K. (1894). *Capital, vol. III*. London: Lawrence and Wishart (1972).
- Marx, K and Engels, F. (1845). *The German Ideology*. New York: International Publishers (1939).
- Marx, K and Engels, F. (1848). *Manifesto of the Communist Party*. London: Penguin Books (1974).
- Marx, K and Engels, F. (1858). *On Britain*. Peking: Foreign Language Publishing House (1962).
- Miliband, R. (1973). 'Marx and the State.' Dalam T. Bottomore (ed.), *Karl Marx*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Miliband, R. (1977). *Marxism and Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Poulantzas, N. (1973). *Political Power and Social Classes*. London: New Left Books.



Gunting dan kirimkan ke alamat Tata Usaha JSP atau fax. (0274) 563362

## FORMULIR BERLANGGANAAN JSP

Mohon dicatat sebagai pelanggan JSP:

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Kode Pos : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Harga Langganan mulai  
Vol. 7. No. 1, Juli 2003  
Rp 60.000,- untuk 1 tahun

FORMULIR INI BOLEH DIKOPI

## BERITA PENGIRIMAN UANG LANGGANAN

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar:  
Rp 60.000,- untuk langganan 1 tahun,

Mulai Nomor \_\_\_\_\_

Tahun \_\_\_\_\_

Uang tersebut telah saya kirimkan melalui:

**Bank Mandiri Cabang MM UGM, Yogyakarta, rekening  
Nomor 137-0001017868,  
A.n. Novi Kurnia CQ Jurnal Fisipol**

Pos Wesel dengan resi nomor \_\_\_\_\_

Tanggal \_\_\_\_\_